BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian "Implementasi Metode Intervensi Sosial oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon" yang telah peneliti jelaskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi metode intervensi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur melalui tiga pendekatan utama. Pada tingkat mikro (bimbingan perorangan), Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan konseling individu secara rutin kepada klien yang menjalani masa integrasi sosial, seperti pembebasan bersyarat. Fokus utama metode ini adalah pemulihan psikososial klien, peningkatan kepercayaan diri, serta dukungan emosional dalam menghadapi tantangan pasca pemasyarakatan. Pendekatan personal dilakukan untuk memahami kondisi psikologis, relasi sosial, dan kesiapan klien kembali ke masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan mediasi dengan keluarga dan pihak eksternal untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Pada tingkat mezzo (bimbingan kelompok), implementasi dilakukan melalui program bimbingan kepribadian, keterampilan, dan terapi komunitas, kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan melibatkan narasumber dari Pokmas Lipas, tokoh masyarakat, hingga psikolog, melalui dinamika kelompok, klien diberi ruang untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas diri, serta membangun interaksi sosial yang positif. Pada tingkat makro (*community organization*), Pembimbing Kemasyarakatan menerapkan pendekatan pengorganisasian masyarakat melalui kegiatan Litmas yang melibatkan keluarga, aparat

desa, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, tujuannya untuk membangun kesiapan lingkungan dalam menerima klien kembali dan menciptakan jejaring dukungan sosial yang berkelanjutan. Kerja sama dengan Pokmas Lipas menjadi strategi penting dalam pengawasan, pelatihan, dan pendampingan klien di lingkungan sosial mereka.

2. Dalam penerapan metode intervensi sosial terhadap klien Pembimbing Kemasyarakatan dihadapkan pada dua jenis hambatan utama, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Hambatan internal bersumber dari dalam diri klien maupun Pembimbing Kemasyarakatan, pada klien hambatan internal yang paling dominan adalah rendahnya motivasi, sikap tertutup, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya proses bimbingan, klien sering kali menganggap kewajiban lapor hanya sebagai formalitas, bukan sebagai kesempatan untuk memperoleh dukungan dan pembinaan, ini menghambat proses asesmen, konseling, dan pendampingan secara optimal, pada Pembimbing Kemasyarakatan hambatan internal dapat berupa beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu, yang berdampak pada intensitas dan kualitas interaksi dengan klien. Hambatan eksternal berkaitan dengan faktor lingkungan fisik dan sosial yang berada di luar kendali langsung Pembimbing Kemasyarakatan maupun klien yang meliputi kondisi geografis tempat tinggal klien yang jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan, keterbatasan sarana transportasi, serta kendala komunikasi karena klien bekerja di luar kota, ini menghambat partisipasi klien dalam sesi wajib lapor dan konseling, hambatan tersebut relatif dapat diatasi dengan solusi teknis seperti penggunaan video call untuk sesi konseling jarak jauh, penjadwalan ulang yang fleksibel, dan optimalisasi pemanfaatan Pos Bapas yang tersebar di

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

wilayah kerja (Kuningan, Indramayu, dan Majalengka). Selain itu, penerapan sistem pencatatan digital juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemantauan dan evaluasi proses intervensi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi metode intervensi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon diperlukan pelatihan lanjutan dan pembinaan rutin bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam bidang konseling, komunikasi dan pendekatan psikososial. Pengembangan sistem informasi terpadu yang mendukung pencatatan digital, pelaporan wajib lapor online, serta pemantauan perkembangan klien secara real-time akan meningkatkan efisiensi kerja Pembimbing Kemasyarakatan serta memudahkan koordinasi antar unit atau Pos Bapas di wilayah kerja. Kolaborasi yang sudah terjalin dengan Pokmas Lipas perlu diperluas, baik dari sisi jumlah mitra maupun cakupan program. Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur, dengan indikator capaian sosial agar efektivitas intervensi dapat diukur secara konkret dan berkelanjutan. Mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam intervensi makro, yakni dengan melibatkan komunitas dalam proses reintegrasi klien.
2. Pembimbing Kemasyarakatan perlu mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih personal dan tidak menghakimi sejak awal interaksi, ini dapat dilakukan melalui pendekatan bertahap dimulai dari percakapan ringan hingga menggali persoalan lebih dalam, tujuannya adalah membangun kepercayaan, mengurangi rasa takut klien, dan meningkatkan keterbukaan mereka dalam proses bimbingan. Untuk

mengatasi hambatan waktu dan kehadiran Balai Pemasyarakatan dapat menyediakan pilihan jadwal konsultasi yang fleksibel, termasuk konseling daring melalui video call atau kunjungan lapangan yang terencana, khususnya bagi klien dengan keterbatasan mobilitas atau pekerjaan luar kota. Untuk mengatasi hambatan geografis Balai Pemasyarakatan perlu mengintegrasikan layanan konseling di Pos Bapas (Kuningan, Indramayu, Majalengka) secara aktif dan tidak sekadar administratif. Klien perlu diberikan pemahaman berkelanjutan bahwa keikutsertaan dalam program bimbingan bukan sekadar kewajiban formal, tetapi sebagai langkah penting dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON